

MANIFESTO PKB



Melayani Ibu Pertiwi



TIM KAJIAN LANSKAP INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I	
SEJARAH SINGKAT PKB	4
BAB II	
IDEOLOGI PARTAI POLITIK	8
BAB III	
VISI DAN MISI	12
BAB IV	
PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN	16
BAB V	
PROGRAM PERJUANGAN PARTAI POLITIK	22
1. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG AGAMA	23
2. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG POLITIK	24
3. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG EKONOMI	25
4. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27
5. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG HUKUM DAN HAM	31
6. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	33
7. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	34
8. ISU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)	37
9. ISU ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	38
10. ISU INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN	40
11. ISU PANGAN, PERTANIAN DAN KELAUTAN	41
12. ISU PERDESAAN	43
BAB VI	
STRATEGI DALAM MEMPERJUANGKAN PROGRAM DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF	46
BAB VII	
POLA RELASI / KOMANDO ANTARA PARTAI POLITIK DENGAN PARLEMEN	50
BAB VIII	
POLA RELASI / KOMANDO ANTARA DPP DENGAN KEPENGURUSAN DIBAWAHNYA	54

BAB I

SEJARAH SINGKAT PKB



SEJARAH SINGKAT PKB

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) ADALAH PARTAI YANG LAHIR SEJAK ERA REFORMASI TAHUN 1998 DAN TIDAK BISA DILEPASKAN DARI PERAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU).



Dalam situs PKB dijelaskan latar historis pendirian partai. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain

sebagainya. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, PBNU mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Tim ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, *Mabda` Siyasi*, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.





Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Media akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis *ahlussunah wal jamaah*. Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.¹

1 <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>

BAB II

IDEOLOGI PARTAI POLITIK





IDEOLOGI PARTAI POLITIK

SEJAK DIDEKLARASIKAN TAHUN 1998, PKB MENYATAKAN DIRINYA SEBAGAI PARTAI YANG BERSIFAT KEBANGSAAN, DEMOKRATIS DAN TERBUKA.



Partai diperlukan sebagai wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah.² Bagi PKB, partai adalah instrument utama demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik. Meskipun disadari adanya kondisi yang tidak ideal atas eksistensi partai politik baik disebabkan faktor internal ataupun eksternal partai politik.

Dokumen *Mabda` Siyasi* PKB menjadi pemandu jati diri partai dan mengurai tentang identitas dan karakter partai. Bagi PKB, cita-cita Indonesia terwujud dalam masyarakat yang ideal dengan pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

PKB bercirikan humanis mereligius (*insaniyah diniyah*), menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan, menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi

² <https://pkb.id/page/naskah-deklarasi/>



sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.³ Dalam AD/ART, PKB mencantumkan jati diri sebagai partai nasionalis, agamis dan humanis serta berwatak moderat, toleran dan adil.

3 <https://pkb.id/page/mabda-siyasi/>

BAB III

VISI DAN MISI



VISI DAN MISI

PKB MENGUSUNG VISI PARTAI UNTUK:

“MEWUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR SECARA LAHIR DAN BATIN, MATERIAL DAN SPIRITUAL, DAN MEWUJUDKAN TATANAN POLITIK NASIONAL YANG DEMOKRATIS, TERBUKA, BERSIH DAN BERAKHLAKUL KARIMAH.”



Sementara misi yang dijalankan oleh PKB adalah:

1. **Dalam bidang ekonomi** adalah menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
2. **Dalam bidang hukum** adalah berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
3. **Dalam bidang sosial budaya** adalah berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4. **Dalam bidang pendidikan** adalah berusaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.



5. **Dalam bidang pertahanan** adalah membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.⁴



4 <https://pkb.id/page/visi-misi/>

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN



PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN

PKB BERASASKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH/KEBIJAKAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.



PKB memiliki prinsip perjuangan partai sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljamaah*.⁵

Dalam Platform Politik PKB 2019-2024 tertuang tajuk perjuangan partai dengan jargon “melayani ibu pertiwi”. Di dalamnya ditegaskan tentang politik *rahmatan lil 'alamin* yang dimaknai sebagai upaya untuk menyemai dan menyebarkan rahmat serta keselamatan bagi seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Politiknya mengedepankan pelayanan total kepada ibu pertiwi, keberpihakan pada kepentingan publik, kaum *mustadh'afin* (lemah dan dilemahkan) dan kehidupan semesta. Meskipun PKB merupakan partai berbasis agama yang lahir dari NU, namun PKB harus tampil bukan saja untuk kepentingan NU dan Islam, melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Platform politik PKB disusun dengan berlandaskan pada nilai-nilai teologis-spiritual dan ideologis-filosofis yang termaktub dalam mabda' siyasi sebagai nilai dasar perjuangan, asas dan prinsip perjuangan, jati diri, watak serta tujuan dan kerja politik PKB dalam pentas politik nasional.

1. Landasan teologis-spiritual dasar teologis-spiritual mengacu kepada kesadaran dan keyakinan PKB bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada manusia (Q.S. Ali Imran;

5 <https://pkb.id/page/asas-prinsip/>





26-27). Kekuasaan itu dititipkan kepada manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi untuk dikelola, dimanfaatkan, digunakan, dan diabdikan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bumi beserta seluruh isinya. (Q.S. Al-Baqarah;30) dan (Q.S. Al-An'am;165). Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta (Q.S. Al-Isra;80). Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk pembelaan kepada kaum *mustadh'afin*, memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. PKB meyakini bahwa hakekat kekuasaan adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan dapat dikontrol pelaksanaannya oleh rakyat. Bagi PKB, kekuasaan dan kepemimpinan adalah amanah Allah yang harus diorientasikan untuk



mewujudkan kemaslahatan publik. Dalam fikih politik Islam, moral yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan pemimpin adalah kemaslahatan bangsa. Dikatakan *tasharruf al-imam `ala al-ra`iyahmanuthun bi al-mashlahah* (tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan umum).

2. **Landasan ideologis-filosofis** dari platform PKB “khidmat politik *Rahmatan Lil `Alamin* melayani ibu pertiwi” adalah Preamble UUD 1945, Pancasila dan *maqasidhu-syari`ah* (kemaslahatan rakyat). Konsepsi ideologis-filosofis tersebut terejawantah dalam penegakan Politik rahmatan lil `alamin yang senantiasa berpijak dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan talipersaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*). Juga senantiasa mewujudkan tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, dan mencapai *maqasid syariah*. Kemudian politik yang memperkuat eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai terbuka, agamis dan nasionalis bercirikan humanism-religius (*insaniyah diniyah*). Langkah implementasi Politik ini tercermin

dalam kebijakan pemimpin eksekutif, legislative dan yudikatif hanya demi sebesar-besarnya kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir-batin seluruh rakyat Indonesia.

- 3. Landasan sosio-historis** dari platform PKB berangkat dari tujuan dan cita-cita reformasi 1998. PKB digagas oleh para ulama dan didirikan secara resmi oleh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Meskipun PKB merupakan partai berbasis agama yang lahir dari NU, namun PKB harus tampil bukansaja untuk kepentingan NU dan Islam, melainkan untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi NU yang didirikan untuk membangun maslahatul ammah (kemaslahatan publik) dengan mengemban mandat keagamaan dan mandat kebangsaan sekaligus. NU dan PKB sepenuhnya sadar bahwa bangsa Indonesia ditakdirkansebagai bangsa yang plural dengan keberagaman suku, ras, agama dan lain-lain. Dalam konteks inilah PKB mengemban mandat politik NU untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa dan kesejahteraan rakyat melalui jalur politik.

BAB V

PROGRAM PERJUANGAN PARTAI POLITIK



PROGRAM PERJUANGAN PARTAI POLITIK

DALAM GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN (GBPP) PKB MENJADI PEDOMAN PARTAI UNTUK MENEGAKKAN EKSTENSINYA DALAM ALAM DEMOKRASI. SEBAGAI ELEMEN PENTING DALAM NEGARA DEMOKRASI, MAKA KONSEKUENSINYA PARTAI POLITIK HARUS MAMPU TAMPIL SEBAGAI PELOPOR PERUBAHAN, UTAMANYA MELALUI RANAH STRUKTURAL.



Pembangunan bangsa yang dilaksanakan oleh negara butuh sokongan partai politik sebagai alat komunikasi publik, agregator kepentingan rakyat dan sarana rekrutmen politik. Berbasis pada ideologi dan nilai dasar yang diyakininya partai politik harus mampu menerjemahkan kepentingan rakyat untuk diperjuangkan dalam kebijakan negara, termasuk kebijakan pembangunan.

GBPP ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Agenda politik, Agenda dan program prioritas, serta Program strategis. Agenda politik merupakan komitmen tentang arah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam berbagai sektor strategis. Agenda dan program

prioritas merupakan agenda perjuangan yang menjadi fokus PKB selama lima tahun ke depan. Sedangkan program strategis adalah rencana umum program penguatan internal partai agar dapat menampilkan kinerja politik yang memadai dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Program tersebut diantaranya:

1. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG AGAMA

Dalam bidang agama, PKB berkomitmen mengembangkan agama yang rahmatan lil 'alamin sebagai basis spiritual untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang damai dan bermartabat serta menjadikannya sebagai basis moral bagi penyelenggaraan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Merevitalisasi tradisi dan nilai-nilai *ahlussunnah wal jamaah* sebagai basis nilai dan moralitas kehidupan kebangsaan dalam berbagai bidang;
- Mengembangkan dakwah Islam rahmatan lil 'alamin sebagai upaya untuk mewujudkan dan mendesiminasi karakter Islam dan toleran;
- Mengantisipasi bahaya radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan meneguhkan meningkatkan dakwah dan pendidikan yang berwawasan kebangsaan;
- Meneguhkan pluralisme, harmonitas dan kebebasan beragama sebagai upaya untuk mengembangkan kemajemukan yang produktif;
- Memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok agama dan kepercayaan minoritas;

- Mendorong deradikalisasi agama secara efektif di lingkungan keluarga, Lembaga Pendidikan, tempat ibadah, birokrasi, TNI-Polri, BUMN/ BUMD, dunia usaha dan seluruh sektor lainnya;
- Memperkuat pendidikan agama dan pondok pesantren untuk memupuk pemahaman keagamaan yang moderat;
- Memfasilitasi umat beragama untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan secara adil dan berkualitas.

2. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG POLITIK

Dalam bidang politik dan pemerintahan, PKB berkomitmen membangun sistem politik dandemokrasi Pancasila, menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi dan reformasi politik serta membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Memperkuat sistem presidensial secara konsisten dan meningkatkan hubungan antar-lembaga tinggi negara yang sehat dan produktif;
- Memperkuat lembaga parlemen dengan melakukan reformasi kelembagaan DPR yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi dan perannya;
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- Melakukan evaluasi terhadap liberalisme politik di Indonesia dengan meninjau ulang sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung;

- Memperkuat reformasi birokrasi secara afektif dan konsisten untuk menciptakan birokrasi kelas dunia dengan peningkatan SDM aparatur, restrukturisasi dan peningkatan pelayanan;
- Mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan menata ulang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang efektif dan sinergis;
- Meningkatkan representasi dan kapasitas politik perempuan dalam politik, baik di ranah legislatif, eksekutif maupun lembaga publik lainnya dengan memberikan afirmasi yang lebih kuat;
- Meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan, baik di level perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- Mengembangkan keterbukaan informasi publik dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

PKB Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari KIP

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Pusat yang digelar di Istana Negara, Jakarta.

(Radar Bangsa, 21 November 2019)

3. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG EKONOMI

Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, PKB berkomitmen untuk membangun kemandirian ekonomi nasional yang bertumpu pada prinsip ekonomi kerakyatan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Melindungi dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, terutama di sektor pangan;
- Mendorong terbangungnya industri dasar sebagai penyokong industri lainnya; Mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan mempermudah akses modal bagi masyarakat;
- Memajukan UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan dengan membuat ekosistem yang kondusif untuk UMKM/koperasi dan mengembangkan produktivitas dan daya saingnya;
- Mendorong kemudahan investasi di sektor produksi baik asing maupun domestik untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- Melawan segala bentuk pemburuan rente dalam setiap impor komoditas, terutama komoditas pangan;
- Meningkatkan kapasitas perdagangan nasional dan mengembangkan ekspor produk dalam negeri;
- Meningkatkan keberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan sebagai upaya untuk membangun fondasi ekonomi berbasis keluarga;
- Menumbuhkan kewirausahaan di kalangan anak-anak muda dan generasi milenial;
- Mendorong pengembangan ekonomi digital yang berorientasi pada pemasaran produk dalam negeri, terutama produk UMKM;
- Meningkatkan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga

memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki aset;

- Membentuk Bank UMKM yang menjadi yang khusus menyediakan modal produksi UMKM;
- Menghentikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberantas praktek kartel serta melakukan optimalisasi fungsi dan wewenang lembaga KPPU;
- Meningkatkan peran BUMN dalam perekonomian nasional dengan meningkatkan orientasi BUMN pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

***Perempuan Indonesia Ikut Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Nasional***

Sebanyak 51% perempuan Indonesia saat ini menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para wanita ini ikut ambil bagian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. "Perempuan-perempuan pekerja itu perlu pendampingan untuk mendongkrak ekonomi rumah tangganya, yang pada gilirannya ikut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," ujar ketua Kornas Suara Perempuan (Super) Jokowi-KH Maruf Amin, Ida Fauziah, di Jakarta, Kamis (23/8/2018). Perjuangan perempuan tidak sebatas kemenangan Pilpres 2019 melainkan didasari kemampuan membangun keluarga-keluarga yang diharmonisasi dengan program pemerintah dan Ormas perempuan yang berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti Perempuan Bangsa & Fatayat NU.

(Pos Kota News, 24 Agustus 2018)

4. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam bidang pendidikan PKB berkomitmen untuk mewujudkan pengembangansumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter untuk mempersiapkan generasi bangsa dan masyarakat yang berkepribadian dan berdaya saing.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Mengembangkan pendidikan karakter sebagai instrumen pembentukan generasi bangsa yang berkepribadian;
- Meningkatkan peran keluarga sebagai fondasi penanaman karakter sejak usia dini;
- Melakukan reformasi sistem pendidikan nasional dengan mendorong perubahan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Meningkatkan dan memajukan mutu serta kualitas pendidikan madrasah dan pesantren sebagai salah satu pilar penting pendidikan nasional;
- Meningkatkan pemerataan akses pendidikan khususnya bagi orang miskin dan masyarakat di daerah pedalaman, tertinggal, terluar, terdepan dan kepulauan; Merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki skill dan kompetensi unggulan;
- Mengembangkan sumberdaya dan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pengembangan SDM di luar jalur pendidikan formal;
- Meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka buta huruf bagi perempuan;
- Memfasilitasi akses pendidikan khususnya bagi orang miskin dan masyarakat di daerah pedalaman, tertinggal, terluar, terdepan dan kepulauan;
- Meningkatkan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas untuk menungjung kualitas pendidikan;

- Mengembangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertaraf internasional.

***Cak Imin Sebut Doa Kiai dan Santri
di Balik Pengesahan UU Pesantren***

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar terus menyosialisasikan Undang-Undang Pesantren keberbagai daerah. Seperti yang dilakukan di sela-sela penandatanganan prasasti Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Arsy sebagai Pesantren Nahdlatul Ulama (NU). Cak Imin mengatakan, pengesahan UU Pesantren merupakan berkah yang patut disyukuri oleh semua pihak, terutama seluruh kalangan pesantren di Indonesia.

(Inews, 13 Oktober 2019)

Dalam bidang kebudayaan, PKB berkomitmen untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Memperkuat pembinaan dan penanaman ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan penyelenggara negara;
- Membina dan memberdayakan organisasi masyarakat untuk menjaga ideologi Pancasila dan NKRI dari gerusan ideologi lain dan menindak tegas kelompok dan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
- Melakukan revitalisasi kearifan lokal dan memperkuat kohesi sosial sebagai modal utama pembangunan;

- Mengembangkan kesenian dan bahasa daerah sebagai khasanah kebudayaan nusantara;
- Mengembangkan olahraga untuk menumbuhkan budaya sportivitas dan mental berprestasi;
- Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat sebagai komunitas asli yang merawat kearifan nusantara dan menjaga ekologi;
- Memajukan kebudayaan Nusantara memperkuat ketahanan budaya bangsa dari berbagai ancaman budaya asing;
- Meningkatkan budaya literasi dan etika komunikasi untuk mengembangkan budaya digital yang beradab;
- Melakukan dakwah kebudayaan untuk Perlawanan terhadap Radikalisme dengan menggunakan metode kekinian;
- Meningkatkan kepeloporan pelajar dan pemuda dalam pemajuan kebudayaan.

Ini Tiga Agenda Strategis Muktamar PKB di Bali

PKB ingin mengembangkan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai dan beradab. Menurut Ida Fauziah, perkembangan zaman dan perubahan sosial belakangan ini menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan keagamaan di Indonesia. Ida mengatakan, berbagai masalah seperti menguatnya radikalisme agama hingga memudarnya kearifan lokal dan kebudayaan nusantara menjadi tantangan nyata di depan mata. Untuk itu, menurut Ida, PKB berkomitmen untuk mengembangkan dakwah sosial dan kebudayaan dengan mempromosikan moderasi keagamaan dan revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa.

(Kompas, 18 Agustus 2019)

5. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG HUKUM DAN HAM

Dalam bidang hukum, HAM, dan Keamanan, PKB berkomitmen untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan menghadirkan negara untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Mendorong penuntasan reformasi sistem peradilan dan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mempercepat perubahan KUHAP dan KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana pertama yang dibentuk oleh bangsa sendiri yang mengikuti kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan untuk memenuhi rasa keadilan;
- Mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperkuat KPK, meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dan mempertegas penindakan terhadap pelaku korupsi, kejahatan perbankan dan pencucian uang;
- Menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) secara adil dengan memastikan terjaminnya hak sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, serta pengungkapan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang belum selesai;
- Mendorong penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dengan memperkuat kerjasama berbagai lembaga penegak hukum dan membentuk pengadilan HAM ad hoc;

- Mengupayakan perlindungan hukum untuk rakyat kecil dan kaum marginal dengan memberikan pendampingan politik dan hukum;
- Meningkatkan perlindungan untuk anak dan perempuan dari tindak kekerasan dan kejahatan human trafficking dan people smuggling dengan memperkuat penegakan hukumnya;
- Mengembangkan pengelolaan konflik sosial untuk meminimalisir dampak dan eskalasinya dengan melibatkan masyarakat;
- Memperkuat netralitas dan profesionalisme Polri agar dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan menjaga keamanan masyarakat;
- Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum di masyarakat;
- Memberantas penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat regulasi, meningkatkan peran BNN dan aparat penegak hukum lain, mendorong peningkatan fungsi dan peran lembaga rehabilitasi serta mengembangkan pondok pesantren pesantren menjadi pusat rehabilitasi narkoba;
- Memperkuat perang melawan terorisme dengan memperkuat regulasi, memaksimalkan

Cuma PKB yang Serius Mengatasi Terorisme

Ketua Umum GP Ansor H Yaqut Cholil Quomas menilai, dari sekian partai politik yang eksis di Indonesia, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang serius menangani persoalan terorisme. Sementara partai lain, hanya membahas aspek politiknya saja.

“Yang lain ngomong soal politiknya saja. Dari sekian parpol yang memberi pernyataan soal terorisme itu, hanya PKB yang serius mencari akar persoalan dan cara penyelesaiannya,” kata Gus Yaqut usai bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB Jakarta.

(Radar Malang, 15 Mei 2018)

peran BNPT, dan mengembangkan kerjasama dengan pesantren, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta kelompok-kelompok strategis lainnya dalam upaya pencegahan terorisme;

6. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, PKB berkomitmen untuk memastikan jaminan kesehatan yang berkualitas dan adil serta menyediakan lapangan kerja yang luas bagi seluruh warga masyarakat.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Merevitalisasi sistem kesehatan nasional untuk memperluas dan meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh rakyat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan berkualitas;
- Memastikan perlindungan kesehatan masyarakat miskin dan kelompok rentan dengan mendorong pelaksanaan pemenuhan alokasi anggaran 5 % dari APBN untuk kesehatan, merevitalisasi puskesmas, meningkatkan peran UBKM dengan pelibatan pesantren;
- Memastikan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang berkeadilan, transparan dan akuntabel, dengan cara mendesak BPJS untuk lebih selektif dalam mendata penerima bantuan;
- Memperkuat pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda dari bahaya peredaran obat berbahaya dan makanan beresiko;

- Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat mustadz'afin dengan mendorong peningkatan anggaran program pembenahan standar kompetensi kerja, pendidikan kewirausahaan, pelatihan kerja dan revitalisasi BLK;
- Meningkatkan SDM tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan dan peluang lapangan kerja;
- Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja Indonesia sebelum dikirim keluar negeri;
- Mendorong mekanisme rekrutmen, penempatan dan purna, bagi pekerja migran yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan;
- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dengan membuat sistem penetapan upah yang dapat memenuhi standar upah, jaminan sosial, jaminan kelangsungan kerja, kebebasan berserikat dan keselamatan kerja;
- Membangun kesetaraan dalam sistem pengupahan buruh;
- Meningkatkan daya beli buruh dengan menyediakan akses kebutuhan dasar dan sosial yang murah dan Menaikkan penghasilan buruh melalui program peningkatan skill dan kompetensi.

7. PROGRAM PERJUANGAN BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam bidang pertahanan, politik luar negeri dan hubungan internasional, PKB berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan dan kewibawaan negara

dengan meningkatkan kapasitas pertahanan negara, mengembangkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif, dan meningkatkan peran Indonesia dalam penciptaan keamanan dan perdamaian dunia.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Memperkuat diplomasi bilateral dan multilateral dengan mewujudkan kemampuan diplomasi yang mengutamakan kepentingan nasional, harkat dan martabat Negara;
- Memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam Nusantara ke dalam kancah politik global dalam menyelesaikan konflik di berbagai belahan dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina;
- Meningkatkan peran Indonesia dalam keanggotaan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan melakukan konsolidasi terhadap kekuatan-kekuatan global untuk mendorong perdamaian dunia;
- Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB;
- Menjaga integrasi nasional dan kedaulatan NKRI dengan mempertegas batas wilayah dan menjaga pulau-pulau terluar dan terdepan dan mengembangkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia;
- Penanganan perbatasan untuk menjaga keutuhan teritorial NKRI, khususnya menjaga

Kepulauan Natuna sebagai wilayah NKRI di tengah konflik di Laut China Selatan, meningkatkan keamanan di Papua, dan mewujudkan seluruh wilayah yurisdiksi nasional sebagai satu kesatuan keamanan negara;

- Menguatkan posisi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudera dan dua benua, melalui diplomasi dan kerjasama maritim komprehensif (comprehensive) maritim cooperation) di kawasan indo pasifik;
- Memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional;
- Memperkuat ASEAN untuk mencegah hegemoni negara adikuasa dalam percaturan politik dan ekonomi;
- Meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama TKI yang mempunyai permasalahan hukum di luar negeri;

***PKB Resmi Jadi Anggota Koalisi
Partai Demokratis Internasional***

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meresmikan dirinya menjadi anggota Centrist Demokrat Internasional (CDI) atau sebuah koalisi partai demokratis seluruh dunia. PKB secara langsung ditawarkan oleh koordinator CDI untuk Asia-Pasifik Caesar Rosello untuk bergabung.

“CDI ini tidak mudah menerima partai politik untuk menjadi anggotanya. Kita bersyukur kita sudah diterima secara resmi menjadi anggota CDI secara penuh tanpa melalui keanggotaan yang bersifat dasar. Satu satunya partai yang diterima CDI di Indonesia ini adalah PKB,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

(DetikNews, 22 Maret 2019)

- Meningkatkan perjanjian kerjasama ekstradisi dengan negara-negara yang telah menjalin hubungan baik dengan Republik Indonesia dalam kepentingan penanganan kejahatan internasional.

8. ISU ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, PKB berkomitmen memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai piranti untuk mendukung pembangunan nasional, memajukan kehidupan masyarakat dan meningkatkan peradaban bangsa.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Mengembangkan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan kemajuan peradaban bangsa;
- Memperkuat dan meningkatkan tradisi riset/penelitian untuk menemukan terobosan baru dalam berbagai bidang;
- Mendorong difusi dan inovasi teknologi yang aplikatif dan tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat;
- Membumikan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan;
- Meningkatkan dukungan terhadap penelitian, pengembangan dan rekayasa IPTEK yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat kelembagaan,

sumberdaya, dan jaringan IPTEK di pusat dan daerah;

- Menciptakan iklim bagi tumbuhnya inovasi-inovasi baru dalam bentuk pengembangan skema insentif; Mengembangkan dan mengadaptasi revolusi industry 4.0 dalam berbagai bidang pembangunan;
- Memberikan fasilitas dan dukungan research and development (R&D) untuk pengembangan usaha.

9. ISU ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bidang energi, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sebagai partai yang konsen pada isu lingkungan berkelanjutan (green party) PKB berkomitmen untuk menciptakan pemanfaatan energi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara adil dan berkelanjutan.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Mendorong reformasi pengelolaan energi dan SDA untuk yang mengedepankan kepentingan nasional;
- Mengatasi krisis energi dengan mendorong penggunaan energi alternatif dan mengembangkan energi baru dan terbarukan sebagai upaya untuk mencegah eksplotasi SDA yang berlebihan yang meliputi energi biomasa, energy angin, energi surya, energi nuklir, mikrohidro, dan energi sampah;
- Mendorong terpenuhinya rasio elektrifikasi nasional 99 persen pada 2020, khususnya di desa-desa tertinggal, terpencil, dan terdepan dengan mendorong optimalisasi pemanfaatan panas bumi;

- Mendorong reformasi tata kelola kehutanan secara komprehensif dan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah;
- Meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan hutan secara adil dengan menjamin kelestarian hutan, meningkatkan keberdayaan masyarakat, serta menjamin distribusi dan akses masyarakat atas hutan;
- Membangun desain pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk mengantisipasi perubahan iklim global dan laju deforestasi;
- Mengembangkan ekowisata sebagai upaya untuk mengintegrasikan kegiatan pariwisata dan pengembangan lingkungan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pedesaan;
- Mendorong pembangunan tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan yang terintegrasi;
- Mendorong reformasi sistem dan tata kelola kelistrikan nasional;

Sejak 2005 PKB Sudah Deklarasi Green Party

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M Hasanuddin Wahid memastikan sejak tahun 2005 PKB sudah mendeklarasikan diri sebagai Green Party. Hingga saat ini terus digelorkan. "Sejak lama telah melihat problem krusial di dunia tentang kerusakan lingkungan hidup yang massif, dan daya tahan bumi yang mulai menurun akibat pemanasan global"

Cak Udin sapaan akrab M Hasanuddin Wahid memastikan PKB melihat kerusakan global, hancurnya ekosistem dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Belum lagi problem energi baru dan terbarukan yang belum diamini banyak negara, kemudian perilaku manusia membakar hutan yang kemudian memunculkan gagasan Green Party.

(PKB.id, 4 Des 2019)

- Mengembangkan mobil listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan;
- Mengembangkan mitigasi bencana dan perubahan iklim; Melakukan pembaruan sistem pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan.

PKB Jadi Partai Digital dari Pusat hingga RT

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, bersama Jokowi, partainya menjadi bagian dari sejarah perubahan bangsa. Sejarah perubahan ke arah yang lebih cepat. "Ke depan, PKB bersama Jokowi akan menjadi peletak peradaban bangsa," terang Gus Ami, sapaan baru Muhaimin, saat pembukaan muktamar.

Menurut Muhaimin, infrastruktur jalan tol dan pengembangan teknologi merupakan bagian utama pembangunan peradaban. "Infrastruktur menjadi fondasi, sudah terbukti dan akan dilanjutkan," tegasnya. Selanjutnya dilakukan pembangunan sumber daya manusia.

(JawaPos, 21 Agustus 2019)

10. ISU INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN

Dalam bidang infrastruktur dan perhubungan, PKB berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang maju dan berkualitas dalam rangka meningkatkan perkonomian nasional dan memberikan pelayanan untuk masyarakat.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Merealisasikan pembangunan infrastruktur transportasi interconnected antara jalur darat, laut, dan udara;
- Membangun perumahan murah untuk rakyat dengan mendorong peningkatan anggaran bantuan swadaya perumahan dan realisasi model tabungan perumahan rakyat;
- Meningkatkan kualitas dan sistem keselamatan transportasi memperbaiki tata kelola dan pengawasan transportasi;

- Mengembangkan infrastruktur pertanian dan meningkatkan tata kelola irigasi yang berihak pada petani kecil;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah perbatasan terluar, terdepan, terpencil, dan kepulauan.

**Pemerintah Didesak untuk Peduli
Kepada Petani Garam Rakyat**

Komisi VI DPR RI Fraksi FPKB Marwan Jafar mendesak jajaran yang berwenang di pemerintahan memberikan kepedulian serta fokus kepada para petani atau pembudidaya garam rakyat. "Sekali lagi, faktanya potensi garam lokal sebetulnya juga cukup besar, namun karena tata kelolanya kurang baik mengakibatkan banyak garam lokal yang tidak terserap di pasar secara maksimal"

(PKB.id, 3 Januari 2019)

11. ISU PANGAN, PERTANIAN DAN KELAUTAN

Dalam bidang pangan, pertanian, dan kelautan, PKB berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis pada potensi pertanian lokal dan sumberdaya kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kecil.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Membangun regenerasi petani yang maju dan berkualitas dengan menciptakan petani-petani baru yang inovatif untuk memajukan dunia pertanian di masa depan;
- Mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
- Mengembangkan pertanian berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, menyediakan pangan sehat untuk masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan memfasilitasi permodalan dan

peningkatan kapasitas petani, dan pemasaran hasil pertanian dan kelautan;

- Mendorong percepatan reforma agraria dengan meningkatkan kepemilikan lahan bagi petani sebagai alat produksi utama pertanian;
- Mengembangkan klaster pertanian berskala besar dan terintegrasi yang dikelola dengan model corporate farming oleh petani/kelompok tani;
- Melakukan reformasi tata niaga pangan dengan membatasi impor, memberikan perlindungan terhadap produk pangan lokal, dan memberikan kepastian harga komoditas pertanian;
- Melakukan reformasi tata kelola pangan nasional dengan membentuk Badan Pangan Nasional sebagai pemegang otoritas tata kelola dan tata niaga pangan nasional sesuai amanat Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Mengembangkan agropreneurship di kalangan petani secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dan meningkatkan inovasi industri pangan pasca-panen untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani;
- Membentuk Bank Pertanian (agriculture bank) sebagai lembaga keuangan yang khusus memberikan kredit untuk sektor pertanian dalam rangka mengatasi permasalahan modal bagi petani;
- Mendukung dan memberikan perlindungan terhadap petani dan nelayan yang memuliakan benih secara mandiri;
- Memperkuat sistem cadangan pangan nasional dan mengembangkan keragaman pangan lokal dengan diversifikasi pertanian;

- Menegakkan kedaulatan laut dengan memberantas *illegal, unregulated dan unreported fishing* untuk mengoptimalkan potensi kelautan sebagai basis pengembangan ekonomi maritim;
- Mengembangkan sentra perikanan budidaya untuk mencukupi kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan;
- Mengembangkan industri perikanan nasional dan melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam negeri.

12. ISU PERDESAAN

Dalam bidang perdesaan, PKB berkomitmen untuk mengawal dan terus memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional dengan menegakkan kedaulatan desa dan meningkatkan pembangunan perdesaan sebagai mandat Undang-Undang Desa.

Komitmen ini dilakukan dengan:

- Memperkuat kedaulatan desa untuk menyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan subsidiaritas dengan mengawal pelaksanaan Undang-Undang Desa secara utuh dan konsisten;
- Memperkuat tata kelola desa dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa, pelibatan partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi perdesaan;
- Menata kementerian/lembaga yang mengurus desa dalam rangka menguatkan desa dalam menjalankan kewenangannya dan membatasi

intervensi Pemerintah Daerah secara mendalam terhadap desa;

- Mendorong integrasi program nasional dengan program pembangunan desa yang lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa;
- Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, baik melalui BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di perdesaan;
- Meningkatkan dan mendorong pemanfaatan dana desa yang difokuskan untuk pengembangan ekonomi produktif dan pengurangan kemiskinan;
- Mengembangkan kawasan perdesaan untuk mengembangkan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal;
- Mengawal pembangunan desa dengan mendorong pembangunan infrastruktur yang terencana dan integratif serta memastikan adanya program pembangunan pembangunan desa yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**PKB ingin Program Desa Lebih Fokus
Penguatan Pemberdayaan**

“Dengan adanya UU Desa, ini suatu langkah kemajuan yang melahirkan kementerian desa hingga para pendamping desa. Kalau pada periode ini fokus kebijakan pada infrastruktur, maka kedepan adalah bagaimana menguatkan pemberdayaan,” ungkap ketua DPP PKB, H. Jazilul Fawaid di Senayan, Selasa (16/07). Bagi PKB, pelbagai persoalan ini merupakan hajat kepentingan masyarakat banyak.

Terutama masyarakat pinggiran yang memang menjadi para konstituen PKB. “Dengan mengidentifikasi Masalah dan membangun rumusan-rumusan persoalan, ini juga merupakan tanggungjawab PKB kepada para pemilih yang merupakan merupakan pemilik kepentingan ini,” tukas Jazil.

(FraksiPkb, 16 Juli 2019)

BAB VI

STRATEGI DALAM MEMPERJUANGKAN PROGRAM DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF





STRATEGI DALAM MEMPERJUANGKAN PROGRAM DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG DAN PENDUKUNG PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN KIAI MAKRUF AMIN, PKB BERKOMITMEN AKAN TERUS MENDUKUNG DAN MENGAWAL PEMERINTAHAN PERIODE 2019-2024 MENDATANG. PKB MENDAPATKAN TIGA KURSI MENTERI REPRESENTASI KABINET PRESIDEN JOKOWI YAKNI MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA, DAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.



Pada Pemilu 2019 PKB berhasil meraih 13.570.097 (9,69%) suara dan 58 kursi DPR RI melampaui perolehan suara dan kursi PKB dalam Pemilu 1999. Ini adalah capaian tertinggi PKB sejak keikutsertaannya dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. PKB mendapat kursi pimpinan DPR sebagai wakil ketua bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESSRA) yang membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, Badan Urusan Rumah Tangga dan Mahkamah Kehormatan Dewan, serta pimpinan MPR sebagai wakil ketua.

Dalam alat kelengkapan DPR, PKB mendapatkan kursi pimpinan wakil ketua komisi II (bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemilihan, pertanahan dan reforma agraria), wakil ketua komisi IV (bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan), ketua komisi VI (bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional), wakil ketua komisi VIII (bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, haji), wakil ketua IX (bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan), ketua komisi X (bidang pendidikan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif), wakil ketua komisi XI (bidang keuangan dan perbankan), wakil ketua Badan Legislasi, wakil ketua Badan Anggaran.

Komposisi dan proporsi dalam eksekutif dan legislatif yang dimiliki PKB mencerminkan perjuangan mewujudkan program partai dalam negara. Tentu ini harus dibuktikan dalam periode ini.



BAB VII

**POLA RELASI /
KOMANDO ANTARA
PARTAI POLITIK
DENGAN PARLEMEN**



POLA RELASI / KOMANDO ANTARA PARTAI POLITIK DENGAN PARLEMEN

PKB DIPERCAYA SEBAGAI WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KESEJAHTERAAN: A. MUHAIMIN ISLANDAR
DAN WAKIL KETUA MPR RI: JAZILUL FAWAID.



Untuk memastikan hubungan partai dan parlemen yang dimiliki oleh PKB, mereka mempersiapkan beberapa strategi diantaranya dengan penguatan disiplin partai. PKB harus melakukan penguatan disiplin partai melalui pengembangan kultur dan kesadaran,

pembentukan regulasi, tata kerja dan tata laksana bagi pengurus dan kader, serta melakukan kebijakan dan tindakan penegakan disiplin partai secara tegas. Kemudian melakukan penguatan dan modernisasi kelembagaan partai meliputi struktur dan hirarki partai, tata kelola, mekanisme kerja, mekanisme pengambilan keputusan, sistem administrasi dan kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan relasi kelembagaan. Hal itu memastikan agar partai dapat berperan sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang sehingga dapat memperjuangkan platform politik secara optimal.

Relasi yang tegas dengan parlemen diwujudkan dalam penguatan fraksi sebagai instrumen perjuangan partai. Fraksi adalah kepanjangan partai politik di ranah legislatif. Dengan demikian sesungguhnya fraksi merupakan ujung tombak perjuangan partai di ranah parlemen. Agar fraksi dapat memperjuangkan platform politik dalam kancah parlemen dengan optimal, maka penguatan fraksi PKB diseluruh tingkatan, baik mulai kabupaten/kota hingga pusat harus dilakukan melalui berbagai strategi, media dan cara yang terukur, sistematis dan berkelanjutan.

PKB juga mengembangkan peningkatan kapasitas legislatornya. Sebagai ujung tombak perjuangan politik, fraksi memegang peranan



strategis. Untuk itu maka anggota legislatif yang duduk di fraksi harus memiliki kemampuan dan kapasitas politik yang memadai dalam memperjuangkan platform partai dan kepentingan konstituen. Untuk itu pengembangan kapasitas anggota legislatif adalah sebuah keniscayaan. Dalam kontak ini kapasitas yang dibutuhkan setidaknya meliputi kemampuan komunikasi politik, kemampuan legislasi, kemampuan penganggaran, dan lain sebagainya.

Selain itu dalam memperjuangkan platform politik tentu PKB tidak bisa sendirian. Hal ini mengingat perolehan kursi PKB di DPR belum sepenuhnya menjadi determinan arah politik nasional secara signifikan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan partai politik lain dalam memperjuangkan platform politiknya, baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Kerjasama ini dilakukan hanya dengan partai politik yang memiliki platform yang sejalan dan tidak bertentangan secara ideologis.

BAB VIII

POLA RELASI / KOMANDO ANTARA DPP DENGAN KEPENGURUSAN DIBAWAHNYA





POLA RELASI / KOMANDO ANTARA DPP DENGAN KEPENGURUSAN DIBAWAHNYA

PKB MENYADARI TERDAPAT TANTANGAN YANG BESAR UNTUK MENJAGA MESIN PARTAI TETAP BEKERJA TIDAK HANYA UNTUK PEMILU SAJA, TETAPI SEPANJANG TAHUN. PKB TELAH MENYUSUN RENCANA YANG DAPAT MENJAWAB TANTANGAN DAN MELAKSANAKAN AGENDA POLITIK DI TENGAH DINAMIKA POLITIK DAN KEBANGSAAN ITU. PKB INGIN TAMPIL MENJADI PARTAI MODERN DAN KUAT.



Program strategis untuk lima tahun kedepan dalam hal ini diantaranya perumusan operasionalisasi ideologi partai, termasuk menyusun *grand design* partai. Desain besar ini menjadi blue print dan panduan teknokratis bagi pengelolaan partai untuk jangka panjang yang terdiri dari operasionalisasi ideologi, desain kelembagaan, sistem kaderisasi, desain program, kerangka regulasi, desain jaringan dan konstituensi, dan daya dukung partai.

Selain itu PKB merevitalisasi kaderisasi politik untuk menjamin agar regenerasi partai berjalan sesuai dengan sistem meritokrasi, maka kaderisasi secara berjenjang harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan desain dan sistem kaderisasi yang sistematis, efektif, dan terukur. Kaderisasi dalam konteks ini adalah sebuah rangkaian proses mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendampingan, pendidikan dan pengembangan kader, hingga promosi dan distribusi kader. Dengan demikian kaderisasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem promosi kader di PKB.

Program strategis lain untuk memastikan hubungan pusat dan basis bekerja adalah penguatan dan perluasan jaringan basis dan kelompok strategis, penguatan sistem rekrutmen politik, pengembangan manajemen kampanye, penguatan jaringan luar negeri dan peran internasional, penguatan politik advokasi, dan penguatan badan otonom dan pembentukan organ taktis partai. PKB benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menjadi partai profesional moderen di tengah kultur, tantangan dan dinamika yang terjadi.
